

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah telah besar bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan memanfaatkan memberikan peluang yang sumber-sumber potensi daerah secara lebih mandiri. Namun demikian, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah tentunya harus berpedoman pada *grand design* kebijakan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit telah dirumuskan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Menurut Arsyad (2012) strategi pembangunan untuk suatu daerah ada empat aspek yaitu 1) strategi makro 2) strategi sektoral 3) strategi wilayah, dan 4) strategi pemilihan proyek-proyek. Salah unsur yang penting dalam kebijakan pembangunan daerah adalah merumuskan strategi perencanaan ekonomi daerah. Menurut Mangiri (2010) perencanaan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Misi umumnya adalah pendapatan perkapita daerah dan pemerataannya. Untuk mewujudkan misi dan tujuan

tersebut diperlukan strategi dengan melihat berbagai potensi sumber daya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya yang tersedia di suatu daerah. Beberapa strategi dimaksud adalah: 1) Strategi dari sudut sumber daya, yang terdiri dari: a) *basis input, surplus* sumber daya manusia (*surplus labor*), b) *basis Input*, sumber daya alam (hasil alam), c) strategi basis sumber daya modal dan manajemen, d) sumber daya lainnya, e) lokasi dan wilayah strategis. 2) Strategi menurut komoditi unggulan; 3) Strategi dari sudut efisiensi, dan 4) Strategi dari sudut Institusi dan aktor ekonomi.

Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik dan potensi yang dimiliki suatu daerah, khususnya sektor-sektor unggulan yang ada, merupakan hal yang penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan dikeluarkan, dengan harapan agar *competitive advantage* tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan suatu daerah.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai beragam potensi wilayah baik yang bersifat alami maupun buatan, yang berpeluang menjadi sektor unggulan daerah. Namun demikian, dengan keragaman potensi yang dimiliki tersebut, sampai tahun 2013 Kabupaten Ponorogo masih masuk dalam sepuluh besar terbawah kabupaten-kabupaten di Jawa Timur berdasarkan ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Oleh karena itu, pemda Kabupaten Ponorogo perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat, khususnya dengan lebih mengoptimalkan peran sektor-sektor unggulan yang dimiliki, agar dapat

meningkatkan kemajuan dan perkembangan wilayah seperti sumber daya alam penunjang industri kecil yang pertumbuhannya cukup signifikan dalam menunjang pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang berlaku pada industri genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Pembangunan industri yang dimaksud tidak hanya industri besar dengan teknologi canggih saja, akan tetapi juga industri kecil dan rumah tangga yang kebanyakan berada di pedesaan. Industri kecil dan rumah tangga yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menyebabkan pengembangan dari industri kecil dan rumah tangga menjadi lebih efektif karena memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha serta mendorong pembangunan daerah dan pedesaan di Indonesia.

Industri di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat pedesaan. Karena peran industri pedesaan yang demikian, maka pengembangan industri pedesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan (Mangiri, 2010).

Salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja adalah sektor industri kecil dimana sektor ini teknologi yang digunakan dalam proses produksinya adalah teknologi padat karya, sehingga dengan

adanya teknologi padat karya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Tarigan, 2014).

Didalam perkembangan yang semakin moderen ini, tugas dari dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) khususnya bidang industri harus mengembangkan dan memberikan motivasi kepada pengrajin, khususnya pengrajin genteng supaya bisa bertahan dan mampu bersaing dengan industri sejenis lainnya.

Dalam hal ini dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) yang memegang peran dalam perkembangan Industri, perdagangan, koperasi, pasar, dan UMKM sangat penting dalam memainkan peran, bagaimana pengembangan industri genteng di kabupaten Ponorogo bisa berkembang sekaligus dapat meningkatkan penghasilan para pengrajin. Hal ini menjadi penting karena Ponorogo dikenal sebagai salah satu kabupaten yang memiliki banyak industri genteng tradisional. Peran yang harus dilakukan dari dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) ialah mengoptimalkan, mengembangkan potensi industri genteng yang ada di Kabupaten Ponorogo, khususnya industri genteng Ponorogo agar bisa bersaing secara harga maupun kualitas, nasional dan juga di internasional.

Adapun potensi industri genteng yang mungkin bisa dikembangkan di Ponorogo antara lain pada kualitas genteng dari genteng biasa menjadi genteng keramik dengan ketebalan dan campuran bahan dasar yang lebih baik. Dari segi

bentuk, dari yang tanpa motif menjadi genteng bermotif dengan corak yang lebih beragam, dan terakhir dari segi warna dari yang hanya memiliki warna dasar tanah liat menjadi genteng dengan berbagai warna sesuai permintaan pasar.

Untuk mengembangkan potensi tersebut, pelaku industri genteng di Ponorogo membutuhkan berbagai bantuan, baik berupa sarana-prasarana, teknis, wawasan maupun sumber daya alam pendukung lainnya. Menjawab hal tersebut, dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengadakan berbagai pelatihan, memberikan bantuan dana, menyiapkan fasilitas dan menyiapkan peta pengembangan wilayah. Namun demikian, beberapa kendala seringkali menghambat peran Dinas Perdagkum.

Hambatan tersebut berasal dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang karena keterbatasan dana dan banyaknya jenis industri yang harus dibina, Dinas Perdagkum tidak sepenuhnya dapat fokus pada industri genteng. Selain itu, kebijakan Bupati terpilih yang lebih menekankan pada industri yang berciri khas/beridentitas Ponorogo (seperti Batik Ponorogo dan Reyog), menjadi kendala tersendiri (wawancara dengan Bapak Sunarjo, salah satu Kasi Dinas Perdagkum kabupaten Ponorogo).

Industri Genteng di Desa Wringinanom ada sejak sekitar tahun 1980-an, awalnya hanya ada beberapa pengrajin dan membuat genteng untuk di pakai

sendiri namun seiring perkembangan zaman karena produk genteng di desa ini bagus para masyarakat sekitar mulai membeli produk tersebut sehingga lama-kelamaan produk genteng di Desa Wringinanom tersebar sampai keluar kota. Para pengrajin tidak hanya memproduksi satu jenis genteng saja namun ada sekitar 3, yaitu press, prentul, dan mantili.

Memperhatikan beberapa hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Survivalitas Pengrajin Genteng dan Kemitraan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM) dalam Menunjang Industri Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: Bagaimanakah survivalitas pengrajin genteng dan kemitraannya dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM) dalam menunjang industri genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan survivalitas pengrajin genteng dan kemitraannya dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro (PERDAGKUM) dalam menunjang industri genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tulis menulis khususnya yang berkaitan dengan survivalitas pengrajin genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat berguna bagi program studi ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan survivalitas pengrajin genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Pemerintah

Menjadi sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah maupun pusat mengenai survivalitas pengrajin genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan istilah

1. Analisis adalah kegiatan pengkajian, penelaahan yang dilakukan dengan cara dan metode tertentu sesuai kaidah ilmiah

2. Survivalitas pengrajin genteng dan kemitraan dengan dinas PERDAGKUM berhubungan dengan perjuangan pengrajin genteng dalam mempertahankan usahanya dan Peran dinas PERDAGKUM yang berhubungan dengan aktivitas pengembangan industri di Kabupaten Ponorogo yang terkait dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo yang dilihat dari a) aspek dukungan kelembagaan UMKM, b) aspek Pengembangan UMKM dan c) aspek pengembangan SDM UMKM dalam memberdayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan (Dinas Perdagkum).
3. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan dimana dari barang mentah atau barang setengah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008)
4. Pengrajin genteng adalah salah satu jenis industri kecil yang memproduksi genteng di desa Wringanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

F. Landasan Teori

Dalam penelitian, landasan teori sangat penting untuk memecahkan permasalahan yang timbul dilapangan dan diperlukan jawaban atas penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi, landasan teori ini akan menjadikan dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Serta dapat

memperkuat masalah yang dialami peneliti dan mengembangkan teori – teori yang mungkin di temui di tempat penelitian.

1. Konsep Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun suatu organisasi. Untuk memahami kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan, sangat bervariasi tergantung dari kompleksitas masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Secara sederhana konsep perencanaan menurut Tarigan (2014) adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya secara lebih lengkap Tarigan (2014) memberi kan pengertian bahwa perencanaan berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang tidak dapat di kontrol (*noncontrolable*) namun relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Friedman dalam Tarigan (2014) perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah aspek ekonomi. Menurut Arsyad (2012) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pada suatu daerah perlu dilakukan perencanaan yang matang. Arsyad (2012) berpendapat terdapat tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu 1) perlunya pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungannya (horizontal dan vertikal) dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, 2) perlu memahami bahwa sesuatu yang tampaknya baik secara nasional (makro) belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional, dan 3) tersedianya perangkat kelembagaan untuk pembangunan daerah seperti administrasi dan proses pengambilan keputusan. Perencanaan yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan.

Mengutip pendapat dari Blakely, maka Arsyad (2012) menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan ekonomi terdapat enam tahap yaitu 1) pengumpulan dan analisis data, 2) pemilihan strategi pembangunan

daerah, 3) pemilihan proyek-proyek pembangunan, 4) pembuatan rencana tindakan, 5) penentuan rincian proyek, dan 6) persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi.

Sedangkan menurut Jhingan (2010) perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga dimana perubahan tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan terjadinya pergeseran paradigma dalam pembangunan ekonomi, maka ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi juga mengalami pergeseran, tidak hanya dari aspek pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau kenaikan pendapatan per kapita penduduknya namun lebih jauh lagi ke arah perkembangan masyarakat. Menurut Arsyad (2012), pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama.

2. Penentuan Prioritas Kebijakan Pembangunan

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah

merumuskan dan mengeluarkan kebijakan. Menurut Keban (2014), kualitas suatu kebijakan dapat diketahui melalui beberapa parameter penting seperti proses, isi, dan konteks atau suasana dimana kebijakan itu dihasilkan atau dirumuskan. Pemerintah perlu memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat yang menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dan proses kebijakan menjadi unsur yang penting dilakukan.

Untuk mengetahui isu yang menjadi prioritas kebijakan dapat dilakukan dengan metode analisis yang dikenal dengan *Analysis Hierarchy Process* (AHP) atau proses hirarkhi analisis. Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Thomas Saaty di tahun 1970'an.

Dalam menetapkan suatu kebijakan, maka perumus kebijakan akan dihadapkan pada banyak faktor baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dimana seringkali analisis yang dilakukan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Dengan metode AHP, maka semua faktor yang dianggap berpengaruh terhadap suatu kebijakan akan diikutkan dalam perhitungan. Menurut Saaty (2010) pada umumnya hal-hal yang berperan dalam pengambilan keputusan adalah a) perencanaan, b) perumusan alternatif, c) menetapkan berbagai prioritas, d) menetapkan alternatif terbaik, e) mengalokasikan sumber daya, f) menentukan kebutuhan, g) memprediksi hasil yang dicapai, h) mendesain sistem i) penilain hasil, j) menjaga kestabilan sistem, k) mengoptimalkan tujuan, dan l) mengelola konflik. Saaty

(2010) menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam pengambilan keputusan, dengan memperhatikan struktur, fungsi, tujuan dan lingkungan.

Beberapa keuntungan dari metode AHP dalam kegiatan analisis antara lain:

- a. Dapat merepresentasikan suatu sistem yang dapat menjelaskan bagaimana perubahan pada level yang lebih tinggi mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur pada level yang lebih rendah;
- b. Membantu memudahkan analisis guna memecahkan persoalan yang kompleks dan tidak berstruktur, dengan memberikan skala pengukuran yang jelas guna mendapatkan prioritas;
- c. Mampu mendapatkan pertimbangan yang logis dalam menentukan prioritas dengan tidak memaksakan pemikiran yang linier;
- d. Mengukur secara komprehensif pengaruh unsur-unsur yang mempunyai korelasi dengan masalah dan tujuan, dengan memberikan skala pengukuran yang jelas.

Sarana yang digunakan dalam metode AHP ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada para responden terpilih yang mengetahui dan memahami dengan baik masalah-masalah yang menjadi obyek penelitian.

3. Industri

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber-sumber daya industry sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*).

Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian*)

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa suatu perusahaan industri akan menghasilkan produk-produk tertentu yang memiliki ciri khas perusahaan, demi untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Untuk perlindungan terhadap hak-hak perusahaan yang bersangkutan, maka produk yang dihasilkan dari industri mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian dalam usaha mendirikan perusahaan industri tidak terlepas dari pengawasan pemerintah.

Pembangunan industri adalah bagian dari program pembangunan jangka panjang untuk merubah struktur perekonomian yang terlalu berat sebelah kepada bahan mentah dan hasil pertanian, kearah struktur ekonomi yang lebih seimbang dan lebih serasi. Artinya perusahaan industri tidak dapat berkembang sendiri tanpa adanya persaingan dari perusahaan lainnya. Misalnya suatu perusahaan industri pengolahan ikan tidak akan berkembang kalau usaha ekstratif perikanan itu menurun. Demikian juga dengan perusahaan industri pengalengan ikan, di mana jika perusahaan ekstratif perikanan meningkat maka usaha pengalengan ikan juga akan meningkat.

Namun sebaliknya apabila perusahaan perdagangan yang dapat memasarkan produknya tidak berkembang, maka pertumbuhan industri pengolahan ikan tersebut tidak akan berkembang.

a. Jenis-Jenis Industri

Jenis industri menurut SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986, yaitu dibedakan berdasarkan klasifikasi dan penjenisannya

Jenis / Macam Industri Berdasarkan Klasifikasi atau Penjenisannya

- 1) Industri kimia dasar contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas dan pupuk.
- 2) Industri mesin dan logam dasar misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor dan tekstil.
- 3) Industri kecil Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es dan minyak goreng curah.
- 4) Aneka industri misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman.

b. Industri Genteng

- 1) Pengertian Genteng

Genteng adalah unsur bangunan yang dipakai sebagai penutup atap. Tanah liat adalah bahan mentah dari genteng dimana tanah liat itu dibakar (genteng keramik) atau dengan cara lain misalnya, dari campuran semen Portland, pasir, dan air yang dicetak dan sesudah itu dibiarkan mengeras. (<http://digilib.petra.ac.id/ads->

cgi/viewer.pl/jiunkpe/s1/sip4/2002/jiunkpe-ns-s1-2002-21497158-1188-tanah merah- chapter2pdf).

Genteng merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat penting karena digunakan sebagai penutup atap untuk menghindari hujan dan panasnya sinar matahari. Bahan bangunan ini mudah didapat di toko-toko dan industri genteng. Genteng merupakan bagian utama dari suatu bangunan sebagai penutup atap rumah. Fungsi utama genteng adalah menahan panas sinar matahari dan guyuran air hujan.

Jenis genteng bermacam-macam, ada genteng beton, genteng tanah liat, genteng keramik, genteng seng dan genteng kayu. Keunggulan genteng tanah liat selain murah, bahan ini tahan segala cuaca, dan lebih ringan dibanding genteng beton. Sedangkan kelemahannya, genteng ini bisa pecah karena kejatuhan benda atau menerima beban tekanan yang besar melebihi kapasitasnya. Kualitas genteng sangat ditentukan dari bahan dan suhu pembakaran, karena hal tersebut akan menentukan daya serap air dan daya tekan genteng.

Genteng merupakan benda yang berfungsi untuk atap suatu bangunan. Dahulu genteng berasal dari tanah liat yang dicetak dan dipanaskan sampai kering. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini genteng telah banyak memiliki macam dan bentuk dan tidak lagi berasal dari tanah liat semata, tetapi secara umum genteng dibuat dari semen, agregat (pasir) dan air yang

dicampur dengan material lain dengan perbandingan tertentu. Selain itu, untuk menambah kekuatangenteng juga digunakan campuran seperti serat alam, serat asbes, serat gelas, perekat aspal dan biji-biji logam yang memperkuat mutu genteng. Dengan mengingat fungsi genteng sebagai atap yang berperan penting dalam suatu bangunan untuk pelindung rumah dari terik matahari, hujan dan perubahan cuaca lainnya. Maka genteng harus mempunyai sifat mekanis yang baik, seperti kekuatan tekan, kekuatan pukul, kekerasan dan sifat lainnya.

2) Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam produk untuk menghasilkan barang jadi (Bale dalam Tarigan 2014). Tanah itulah yang disebut bahan baku sebagai contoh yaitu tanah menjadi batan (setelah tanah di cangkul kemudian diolah oleh mesin molen keluar sudah berupa tanah yang berbentuk kotak atau kueh). Bahan baku yang terpenting dalam pembuatan genteng adalah tanah. Tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik (Arsyad, 1989:1). Tanah yang dijadikan bahan baku tersebut tidak semua tanah bisa dibuat menjadi genteng. Jenis tanah yang baik untuk pembuatan genteng adalah tanah lempung atau tanah grumusol, jenis tanah ini memiliki kandungan sedikit pasir, agak lengket, warna hitam, mudah meresap air.

3) Faktor Produksi

Faktor Produksi Tidak ada industri yang sepenuhnya 'berdiri sendiri' atau dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Suatu industri mempunyai keterkaitan dengan industri lain dan mungkin juga dengan masyarakat umum. Keterkaitan-keterkaitan fungsional semacam itu mungkin berhubungan dengan masukan dan pengeluaran. Karena pada prinsipnya industri meliputi tiga hal, yaitu masukan, proses dan keluaran. Keberadaan suatu industri tidak terlepas dari adanya faktor-faktor produksi yang mendukungnya. Bale (dalam Tarigan 2014) menyebut faktor produksi sebagai faktor lokasional atau faktor yang mempengaruhi lokasi dari suatu industri, dan faktor produksi ini yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi suatu industri.

Suatu industri cenderung berlokasi pada tempat yang menyediakan akses yang paling optimum terhadap faktor-faktor produksi. Faktor produksi menjadi pertimbangan penting dalam berdirinya suatu industri dan akan menentukan keeksistensiannya. Menurut Bintarto, 1997 dalam Wulandari, 2000) syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan aktifitas suatu industri adalah tersedianya bahan baku, tenaga kerja, modal, fasilitas perhubungan dan transportasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi wilayah merupakan faktor yang berpengaruh. Faktor-

faktor produksi tersebut sangat mempermudah atau mendukung keberadaan suatu industri. Beberapa faktor tersebut meliputi:

- a) Faktor modal Faktor utama dalam pendirian suatu industri adalah modal. Karena modal sangat diperlukan untuk pembelian bahan baku, alat atau mesin pencetak, dan ongkos tenaga kerja. Tanpa modal yang cukup suatu industri tidak mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya.
- b) Faktor fasilitas perhubungan dan transportasi Salah satu faktor penentu dan sarana pendukung bagi persebaran industri fasilitas perhubungan dan transportasi yang sangat dipertimbangkan oleh pihak investor untuk mendirikan suatu industry.
- c) Faktor bahan baku Dengan tersedianya bahan baku di suatu tempat menjadi tidak berguna jika masyarakat tidak mau dan mampu mengolahnya. Ketersediaan bahan baku yang memadai sering menjadi suatu pertimbangan untuk pendirian suatu industri. Dengan demikian, suatu wilayah yang memiliki cukup bahan baku bisa dipastikan merupakan wilayah terdapatnya industri.
- d) Faktor pemasaran Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan / profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar,memberikan dividen

kepada pemegang saham, membayar pegawai karyawan, buruh dan lain-lain. Menurut J. Stanton yang dikutip oleh Riyadi Deddy S.B. 2014 (2014) mengemukakan pemasaran sebagai berikut bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

4. Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo

Dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan di Bidang Industri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
- b. Fasilitas pengembangan usaha dalam rangka pengembangan IKM.
- c. Perumusan penetapan perlindungan kapasitas berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
- d. Perumusan perencanaan jangka panjang pembangunan industri di kabupaten.
- e. Promosi produk kabupaten.
- f. Teknologi:
 - 1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.
 - 2) Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan

teknologi di bidang industri.

- 3) Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

g. Standarisasi

- 1) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standart yang akan dikembangkan di kabupaten.
- 2) Kerjasama bidang standarisasi

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Perumusan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembinaan industri di kabupaten.
- 2) Koordinasi dan fasilitas diklat SDM industri dan aparatur pembinaan industri di kabupaten.

i. Kerjasama Industri

- 1) Fasilitas kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.
- 2) Fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.
- 3) Pelaksanaan hasil – hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.

j. Pembinaan asosiasi industri

- k. Koordinasi dan fasilitas pengembangan pusat – pusat industri yang terintegritasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk

industri yang mengacu pada tata ruang regional.

Didalam pengembangan Industri dan Usaha Kecil Menengah ada beberapa aspek – aspek yang diperlukan untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

a. Aspek Dukungan Kelembagaan UMKM

Berdasarkan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek dukungan kelembagaan UMKM sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) huruf g ditujukan untuk: mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dari pasal 15: yang dimaksudkan dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada UMKM sebagaimana mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologo, bisnis dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (bisnis development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendamping untuk mengembangkan UMKM.

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan

konsultasi dan pendamping kepada UMKM agar mampu mengakses kredit perbankan dan pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

b. Aspek Pengembangan UMKM

Berdasarkan pasal 16 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembangan UMKM adalah:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memfasilitasi usaha dalam bidang:
 - a) Produksi dan pengolahan.
 - b) Pemasaran.
 - c) Sumber daya manusia.
 - d) Desain dan teknologi.
- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1

Berdasarkan pasal 17 UU NO.20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang produksi dan pengelolaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a) Meningkatkan teknis produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi UMKM.
- b) Memberikan kemudahan dalam penegadaan sarana dan prasarana produksi pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM.
- c) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan

pengolahan.

- d) Meningkatkan kemampuan rancangan bangunan dan perkerajaan bagi usaha menengah.

3) Aspek Pengembangan SDM UMKM

Sebagaimana Pasal 19 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang SDM sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a) Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
- b) Meningkatkan keterampilan teknis dan material.
- c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha. (Perbup Bupati Nomor 57 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo).



Dalam kerangka pikir penelitian di atas digambarkan bahwa penelitian ini menganalisis peran Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo yang dominan dalam mendukung UKM yang ada. Dukungan tersebut berupa pengembangan kelembagaan UMKM, dukungan terhadap Pengembangan UMKM dan dukungan terhadap pengembangan SDM UMKM. Pada penelitian ini dukungan tersebut diberikan kepada Industri Genteng di Wringinanom. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadikan Industri Genteng di Wringinanom menjadi industri yang sehat dan laik usaha. Selanjutnya Industri Genteng Wringinanom yang sehat, akan berdampak positif pada masyarakat sekaligus menjadi umpan balik positif bagi pemerintah sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan program.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah merupakan suatu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu variabel yang menjadi pokok penelitian. Berdasarkan definisi pelayanan publik di atas, maka definisi operasional dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) dalam menunjang industri genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam penelitian ini diukur berdasarkan 15 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Berdasarkan pasal 16 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan Berdasarkan pasal 16 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi

Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan di Bidang Industri sebagai berikut:

1. Aspek Dukungan Kelembagaan UMKM

Menyiapkan lembaga pendukung pengembangan UMKM:

- a. Lembaga layanan pengembangan usaha
- b. Konsultan keuangan mitra bank

2. Aspek Pengembangan UMKM

Memfasilitasi usaha dalam bidang: Produksi dan pengolahan. Pemasaran. Sumber daya manusia, . Desain dan teknologi dengan perincian:

- a. Meningkatkan teknis produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi UMKM.
- b. Memberikan kemudahan dalam penegadaan sarana dan prasarana produksi pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM.
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- d. Meningkatkan kemampuan rancangan bangunan dan perekayasaan bagi usaha menengah.

3. Aspek Pengembangan SDM UMKM

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan material.
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan

untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini mempunyai karakteristik potensi yang beragam dengan daerah pergunungan. Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Nopember 2017.

2. Informan

Dalam penentuan informan penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu alasan-alasan yang diketahui sifat dari informan yang di anggap tahu dalam masalah yang sedang di teliti. Sehingga informana yang di ambil dalam penelitian ini berjumlah 7 informan. Informan di sini adalah orang-orang yang terlibat didalam penelitian yang mengetahui tentang Pengrajin Genteng di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu:

- a. Kepala dinas perdagangan, koperasi dan usaha mikro (Perdagkum) 1 orang
- b. Kepala bidang industri 1 orang
- c. Staf bidang industri 1 orang
- d. Pengrajin genteng/masyarakat Wringinanom 4 orang

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, agar dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subjek yang tepat serta hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan (Nasir, 2007, hal 98).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode wawancara (interview)

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang ada. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan seseorang yang menjadi sasaran penulis, tanpa mengakibatkan perubahan aktivitas pada kegiatan yang bersangkutan. Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung (Nasir, 2007, hal 101)

c. Dokumentasi

Metode ini salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berupa arsip dan dokumen baik yang berada di suatu instansi atau kantor, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknis dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal

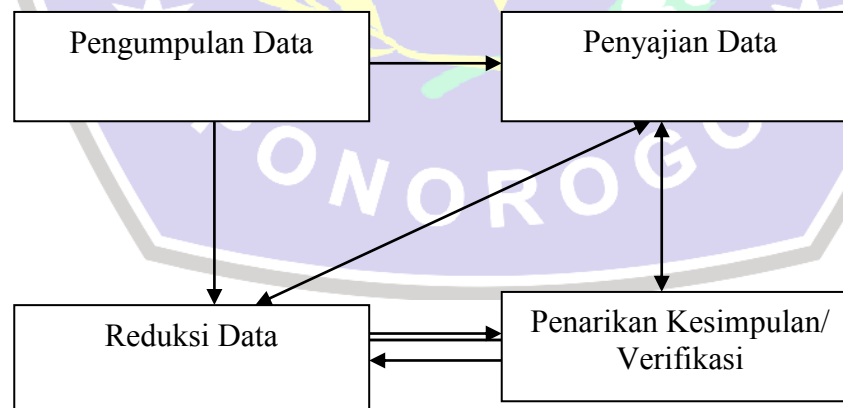
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah dan sebagainya (Nasir, 2007; 132).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisa melakukan penggalian yang secara mendalam. Analisa data kualitatif prosesnya ada berbagai cara yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Dan juga berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, atau hubungan-hubungan. (Nasir, 2007, hal 100).

Secara ringkas proses analisa data dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles dalam Nasir, 2007, hal 101)

Gambar 1.1
Skema Analisis Data Penelitian



(Nasir, 2007: 146)

Dalam model interaksi, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaksi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan data tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Huberman dan Miles dalam Nasir, 2007) seperti gambar di atas.

Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara ke empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian berlangsung.

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. (Krisyantono, 2009: 148)

b. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. (Krisyantono. 2009: 150)

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Krisyantono. 2009: 151)

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan

penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat) (Krisyantono. 2009: 151).

Dari pengertian di atas diketahui urutan analisis data adalah; melalui tahap pengumpulan data, menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis data yang terhimpun untuk kemudian ditarik kesimpulan.

